



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : G/C16/B.VIII/HK/91  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN MENABUNG  
( FKPM )  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tersedianya sumber dana bagi pembangunan nasional khususnya daerah Tingkat I Lampung, perlu dilakukan usaha melalui pendidikan menabung untuk mendorong penggerakan dana masyarakat melalui lembaga perbankan.
- b. bahwa kegiatan pendidikan menabung yang selama ini dilaksanakan oleh Dewan Koordinasi dan Pembina Gerakan Tabungan Nasional akan dilanjutkan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Menabung ( FKPM ).
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu diupayakan penanganan yang terpadu antar berbagai lembaga/instansi yang terkait dalam suatu Forum Komunikasi Pendidikan Menabung ( FKPM ).

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 22/64/Kep/Dir tanggal 1 Desember 1989 tentang Forum Komunikasi Pendidikan Menabung.

Memperhatikan

- : Surat Pimpinan Cabang Bank Indonesia Nomor : 23/22/UPG/PPDn/Bdl tanggal 18 September 1990 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Menabung.

Memutuskan. . . . .

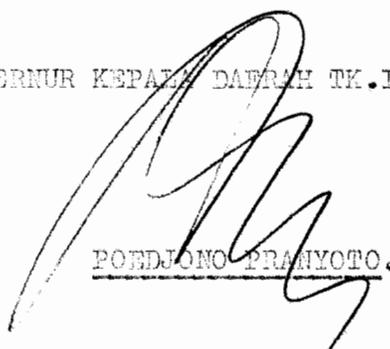
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Menabung ( FKPM ) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan kegiatan FKPM, berpedoman pada Pedoman Kerja Forum Komunikasi Pendidikan Menabung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan FKPM tersebut dibebankan pada Bank Indonesia Cabang Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 07-01-1991

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Yth. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
  3. Yth. Sdr. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.
  4. Yth. Sdr. Para Bupati/Walikota/KDH.Tk.II se- Propinsi Dati I Lampung.
  5. Yth. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi Vertikal Tingkat I Lampung.
  6. Yth. Sdr. Para Direksi Bank Pemerintah/Swasta se- Propinsi Dati I Lampung.
  7. Yth. Sdr. Masing-masing anggota Pengurus FKPM.
  8. Himpunan Keputusan.
-

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/016/B.VIII/HK/91  
TANGGAL : 7 Januari 1991

SUSUNAN PENCURUS  
FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN MEMABUNG ( FKPM )  
DAERAH TINGKAT I PROPINSI LAMPUNG.

| <u>N A M A</u>            | <u>J A B A T A N</u> | <u>LEMBAGA/INSTANSI</u>                          |
|---------------------------|----------------------|--|
| Poedjono Pranyoto         | Penasehat            | Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.                |
| Achmad Mufti              | Ketua                | Pimpinan Cabang Bank Indonesia.                  |
| Drs. Fauzie Saleh         | Anggota              | Assisten II Sekwilda.                            |
| M.Z. Abidin               | Anggota              | Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan. |
| Thamrin Alwi              | Anggota              | Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan.     |
| Drs. H. Sjamsuddin Thohir | Anggota              | Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.          |
| Drs. Syamsuddin Zakaria   | Anggota              | Kadis P & K Dati I Lampung.                      |
| Mi. Moh. Basir            | Anggota              | Kwartir Daerah Gerakan - Pramuka.                |
| Drs. M. Syarifuddin       | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |
| M. Syahrir                | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |
| Winarso                   | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |
| HM. Sirad Azwar           | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |
| JBP. Sutardi              | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |
| Budi Santoso              | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |
| Marwan Cut Hasan          | Anggota              | Badan Musyawarah Perbankan Daerah Lampung.       |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/016/B.VIII/HK/91

TANGGAL : 7 Januari 1991.

TENTANG : PEDOMAN KERJA FORUM KOMUNIKASI PEN  
DIDIKAN MENABUNG ( FKPM ).

=====

## I. PENDAHULUAN

Program pembangunan nasional dewasa ini berada dalam Repelita V yang merupakan tahap akhir pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama dan sekaligus pula sebagai titian untuk melangkah kearah proses ting gal landas. Agar program pembangunan nasional ini dapat tercapai, maka diperlukan penyediaan sumber dana guna pembiayaan pembangunan itu sen diri, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap bagi keseluruhan pembiayaan pembangun an dan diharapkan secara bertahap akan semakin berkurang peranannya. Oleh karena itu guna memenuhi amanat yang tertuang dalam GBHN dan se kaligus pula untuk lebih menjamin tersedianya sumber dana bagi pempa ngunan nasional, maka upaya pengerahan dana dari dalam negeri terutama dalam bentuk tabungan masyarakat perlu untuk terus ditingkatkan - sejalan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Salah satu usaha untuk menunjang hal tersebut diatas adalah de ngan mendorong pengerahan dana masyarakat melalui lembaga perbankan. Usaha ini bukan merupakan suatu hal yang mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya baik yang ada dalam jangkauan maupun diluar jang kauan perbankan. Mengingat faktor-faktor yang ada diluar jangkauan per bankan relatif sangat sukar, maka usaha untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat memerlukan penanganan yang terpadu antar berbagai lem бага/instansi.

Melalui keterpaduan ini diharapkan akan diperoleh hasil yang optimal dalam bentuk terciptanya suatu masyarakat yang terbiasa menabung dan hal ini berarti pula suatu bentuk peran aktif dari masyarakat untuk - turut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menciptakan situasi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia menganggap perlu untuk menata kembali pola pendidikan menabung yang selama ini dilaksanakan - melalui Dekop GTN dengan membentuk suatu forum yang dinamakan Forum Ko munikasi Pendidikan Menabung ( FKPM ). Pembentukan FKPM ini tidak ber arti bahwa Dekop GTN yang ada selama ini tidak berhasil, namun lebih - didasarkan pada perubahan kebijakan Pemerintah agar tujuan yang ada dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

II. Tujuan dan Tugas Pokok .....

## II. TUJUAN DAN TUGAS POKOK.

Pembentukan FKPM mempunyai tujuan pokok untuk mendorong kebiasaan menabung diseluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penerahan dana masyarakat melalui lembaga perbankan. Tujuan diatas merupakan suatu tujuan ideal dalam pengertian bahwa pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan suatu proses terus menerus dari generasi ke generasi, hanya beban tugas dan pola pendekatan untuk mencapai tujuan dimaksud yang mungkin berubah-ubah sesuai dengan perkembangan hasil yang dicapai.

Apabila dijabarkan lebih lanjut maka tujuan tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut :

### 1. Tujuan Umum.

#### 1.1. Aspek Pendidikan :

a. Berusaha untuk membangkitkan dan menanamkan kesadaran menabung diseluruh lapisan masyarakat.

Dengan usaha tersebut diharapkan bahwa kegiatan menabung akan lebih membudaya dan masyarakat akan lebih mengenal dan memanfaatkan jasa-jasa perbankan.

b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengendalikan penggunaan uang karena dengan cara menabung akan tertanam rasa menghargai uang serta jerih payah yang dilakukan untuk memperoleh uang tersebut.

#### 1.2. Aspek Ekonomi.

Berusaha untuk mengerahkan sebanyak mungkin dana yang berasal dari masyarakat guna meningkatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan yang berasal dari dalam negeri.

### 2. Tujuan Khusus

Berusaha untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan menabung mereka akan terlindung dari situasi yang kurang cerah dikemudian hari.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka tugas pokok dari FKPM adalah sebagai berikut :

#### 1. Mengadakan pertemuan dan konsultasi secara rutin untuk :

1.1. Menetapkan target peningkatan jumlah penabung dan nilai tabungan yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

1.2. Merumuskan .....

- 1.2. Merumuskan program kerja yang diperlukan untuk lebih meningkatkan pendidikan menabung.
  - 1.3. Menetapkan langkah-langkah yang berkaitan dengan usaha pendidikan menabung.
  - 1.4. Merumuskan bentuk kerjasama dan koordinasi yang efektif antar instansi.
  - 1.5. Mengadakan evaluasi atas hasil pelaksanaan program kerja.
2. Melaksanakan kampanye dan memberikan penerangan kepada masyarakat secara terpadu.

Kedua tugas pokok tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dimana penjabaran operasional akan dijelaskan pada pola pelaksanaan kerja FKPM.

### III. ORGANISASI FKPM

Organisasi FKPM merupakan organisasi antar lembaga/instansi yang bersifat fungsional dan keanggotaannya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/64/Kep/Dir, terdiri dari fihak-fihak yang terkait dan dianggap mampu untuk mempengaruhi masyarakat.

Dari sudut penyebarannya, FKPM hanya ada ditingkat Pusat, Daerah Tingkat I serta diluar Daerah Tingkat I tempat kedudukan Kantor Bank Indonesia. Meskipun penyebaran FKPM relatif terbatas, namun tidak berarti bahwa tanggung jawab FKPM terbatas pada Daerah kedudukan Bank Indonesia karena tanggung jawab tersebut mencakup pula wilayah kerja Bank Indonesia. Dengan demikian pada dasarnya FKPM mencakup pula seluruh Indonesia.

Untuk Bank Indonesia yang berkedudukan di ibukota Daerah Tingkat I dan membawahi kantor cabang Bank Indonesia yang ada pada Daerah Tingkat II, maka FKPM Daerah Tingkat I akan bertindak pula sebagai koordinator bagi FKPM diluar Daerah Tingkat I tersebut.

Mengingat organisasi FKPM beranggotakan unsur-unsur lembaga/instansi terkait, hendaknya koordinator masing-masing FKPM secara rutin mengingatkan kepada seluruh anggota bahwa misi yang terkandung dalam pembentukan FKPM adalah misi Pemerintah dan bukan semata-mata untuk kepentingan perbankan. Dengan demikian berarti pula bahwa keberhasilan FKPM merupakan tanggung jawab bersama dan perlu ditunjang dalam bentuk kerja nyata oleh masing-masing lembaga/instansi yang terkait.

### IV. POLA PELAKSANAAN KERJA FKPM.....

#### IV. POLA PELAKSANAAN KERJA FKPM.

Secara ringkas pelaksanaan kerja dari FKPM dapat dilihat pada bagan I. Adapun penjabaran lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut :

##### 1. Piranti yang digunakan.

Pada dasarnya FKPM akan menggunakan seluruh bentuk piranti -  
pengarahan dana masyarakat melalui perbankan, namun secara khusus  
piranti yang dipakai adalah seluruh jenis tabungan yang diselengga  
rakan oleh Bank. Dalam pelaksanaannya FKPM berdiri diatas seluruh  
jenis tabungan. Pola ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa -  
masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih sendiri jenis tabung  
an yang memenuhi selera mereka dan dilain pihak penyimpanan dana  
pada Bank dalam bentuk dan nama apapun akan merupakan suatu bentuk  
pendidikan menabung yang ada akhirnya akan meningkatkan pengerahan  
dana masyarakat melalui lembaga perbankan secara keseluruhan.

##### 2. Jalur Pelaksanaan.

Sesuai dengan struktur keanggotaan yang ada, maka pola pelaksanaan  
kegiatan FKPM akan menggunakan kombinasi berbagai jalur yang ter -  
sedia yakni :

###### 2.1. Jalur Pendidikan.

Jalur ini dilaksanakan oleh jajaran Departemen Pendidikan -  
dan Kebudayaan, Departemen Agama serta Gerakan Pramuka.

Secara garis besar jalur ini terbagi kedalam 2 sub jalur -  
yakni :

- a. Jalur pendidikan formal disekolah, yaitu jalur yang bersi-  
fat formal mulai dari tingkatan Sekolah Dasar sampai dengan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- b. Jalur pendidikan luar sekolah yaitu jalur yang bersifat -  
informal misalnya kegiatan organisasi pemuda dan kegiatan  
pramuka. Termasuk dalam jalur ini adalah Kejar Paket A ser  
ta pendekatan jajaran Departemen Agama kepada para ulama  
untuk turut serta berpartisipasi dalam mendorong masyarakat  
untuk hidup secara hemat dan berencana.

###### 2.2 Jalur Media Massa.

Jalur ini dilaksanakan oleh jajaran Departemen Penerangan serta  
perbankan dan secara garis besar terbagi kedalam 3 sub jalur  
yakni

- a. Media cetak . . . . .

- a. Media cetak antara lain melalui surat khabar, majalah, brosur dan leaflet.
- b. Media elektronik yaitu dalam bentuk kampanye melalui radio, televisi, dan audio visual lainnya.
- c. Media tradisional yaitu dalam bentuk tatap muka misalnya dalam acara kolompencapir dsb.

Pelaksanaan penerangan kepada masyarakat tidak perlu dilakukan secara khusus karena misi tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan program lainnya, misalnya melalui para juru penerang.

### 2.3. Jalur Kelembagaan.

Jalur ini dilaksanakan oleh seluruh instansi/lembaga terkait baik secara sendiri-sendiri maupun secara terpadu, misalnya untuk jajaran Departemen Dalam Negeri dapat digunakan jalur PKK serta LIKED sedangkan kegiatan lain yang dapat ditempuh oleh seluruh instansi/lembaga yaitu misalnya pembayaran gaji melalui berbagai jenis tabungan.

### 3. Pola Pertemuan.

Sebagaimana sudah digariskan bahwa pertemuan FKPM diatur sedemikian rupa agar dapat diperoleh suatu umpan balik yang dapat digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh efektifitas dan efisiensi FKPM. Pertemuan FKPM diluar Daerah Tingkat I dilaksanakan sebelum pertemuan FKPM Daerah Tingkat I dengan maksud agar dapat dijadikan masukan dalam pembahasan pada tingkat yang lebih tinggi. Melalui pertemuan yang diatur sebanyak 4 kali dalam setahun, maka paling tidak ada 4 hal yang dibahas yakni penyusunan program kerja, evaluasi hasil yang dicapai, masalah yang dihadapi serta penanggulangannya dan implementasi pemecahan masalah. Secara garis besar pola pertemuan dapat dilihat pada sistim pementauan FKPM dalam bagan II.

### 4. Penyampaian Laporan.

Sistim penyampaian laporan hasil pertemuan oleh FKPM Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat dilihat pada bagan III dan diatur sebagai berikut :

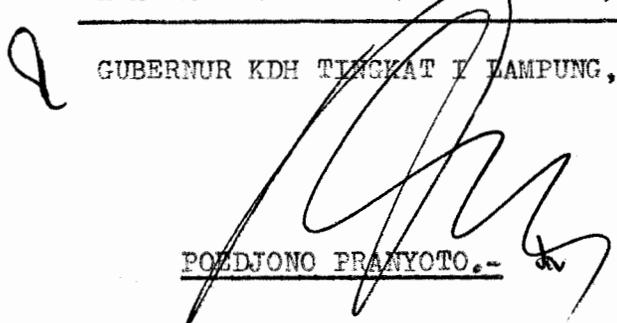
- a. Hasil pertemuan FKPM diluar Daerah Tingkat I disampaikan kepada FKPM Daerah Tingkat I yang bertindak sebagai koordinator.

b. FKPM Daerah Tingkat I . . . .

- b. FKPM Daerah Tingkat I menyampaikan hasil pertemuan kepada FKPM Tingkat Pusat melalui Bagian Penelitian dan Pengembangan Dana. Termasuk dalam laporan ini adalah hasil pertemuan yang diadakan oleh FKPM diluar Daerah Tingkat I yang dikoordinirnya.
- c. Penyampaian program kerja dan rencana anggaran dari FKPM Daerah Tingkat I dan FKPM diluar Daerah Tingkat I kepada FKPM Pusat dilakukan selambat-lambatnya pada awal bulan Oktober.

DITETAPKAN : DI TELUKBETUNG .-

PADA TANGGAL : 07 Januari 1991

 GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.- 